

AKTA PUNCAK
- MULUS -
NO. 49
TGL. 18 JUNI 2016



HUSNAWATY, SH

NOTARIS - PPAT

NOTARIS:

JALAN CANDI ANGGO NO. 88 / 108
MASUK DARI JL. JEND. SUDIRMAN
SAMPI HJ. TRIEST BANK ATAU
JL. VETERAN DELAKANG
RUMAH MURAH PACI DORE
PALEMBANG
SUMATERA SELATAN
TELP. (0711) 389989 - 312744

RUMAH:

JALAN MAYOR ZEN NO. 28 RT. 36
SAMPING PURWEDMAS - PALEMBANG
(SUMATERA SELATAN)
TELP. (0711) 720477

AKTA:

AKTA PUNCAK TGL. 18 JUNI 2016 - NOTARIS HUSNAWATY

NOMOR:

49

TANGGAL:

18 JUNI 2016

Penulis: Dr. Lestari, S.Pd., M.Pd. (Lestari) dan Dr. Haryati, S.Pd., M.Pd. (Haryati)

Editor: Dr. Haryati, S.Pd., M.Pd. (Haryati)
Dekan: Dr. Haryati, S.Pd., M.Pd. (Haryati)

Penulis: Dr. Lestari, S.Pd., M.Pd. (Lestari), Dr. Haryati, S.Pd., M.Pd. (Haryati)
Editor: Dr. Haryati, S.Pd., M.Pd. (Haryati)
Dekan: Dr. Haryati, S.Pd., M.Pd. (Haryati)

1. **Tujuan Pendidikan Nasional.** Tujuan Pendidikan Nasional (TPN) adalah memberikan kesempatan bagi seluruh bangsa untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran berdasarkan nilai-nilai kebhinekaan, toleransi, persatuan, dan perdamaian. Tujuan Pendidikan Nasional ini mencakup tujuan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, serta tujuan pendidikan keseharian. Tujuan Pendidikan Nasional ini diwujudkan melalui pelajaran pokok bahasan di sekolah dasar, menengah, dan tinggi, dan dilaksanakan melalui program pengembangan karakter dan sikap.

2. **Tujuan Pendidikan Nasional.** Tujuan Pendidikan Nasional (TPN) adalah memberikan kesempatan bagi seluruh bangsa untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran berdasarkan nilai-nilai kebhinekaan, toleransi, persatuan, dan perdamaian. Tujuan Pendidikan Nasional ini mencakup tujuan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, serta tujuan pendidikan keseharian. Tujuan Pendidikan Nasional ini diwujudkan melalui pelajaran pokok bahasan di sekolah dasar, menengah, dan tinggi, dan dilaksanakan melalui program pengembangan karakter dan sikap.

3. **Tujuan Pendidikan Nasional.** Tujuan Pendidikan Nasional (TPN) adalah memberikan kesempatan bagi seluruh bangsa untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran berdasarkan nilai-nilai kebhinekaan, toleransi, persatuan, dan perdamaian. Tujuan Pendidikan Nasional ini mencakup tujuan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, serta tujuan pendidikan keseharian. Tujuan Pendidikan Nasional ini diwujudkan melalui pelajaran pokok bahasan di sekolah dasar, menengah, dan tinggi, dan dilaksanakan melalui program pengembangan karakter dan sikap.



1. Tuan HILMIYAH KANTOR, lahir di Palembang, pada

tanggal 29 September 1949, memiliki nomor identitas

Unsur Laki lahir 110-01-1950), Marga Negara Indonesia,

Warganegara, bertempat tinggal di: Palembang, Jalan

Sukajadi/Kecamatan Nomor 1490, Rukun Tetangga CCI, Rukun-

Marga 009, Kelurahan 9 XIII, Kecamatan XIII P. Timur II,

Palembang, Raya Tanda Presidium HK.1671041702600001.

2. Tuan SIBANDI, lahir di Medan, pada tanggal 11 Juli 1965,

Marga Negara Indonesia, Karyawan swasta, bertempat

tinggal di: Palembang, Perum Bulak Bejastra Blok

C-21, Rukun Tetangga 010, Rukun Marga 022, Kelurahan

Bulak Lame, Kecamatan XIII Barat I, Palembang Raya —

Tanda Presidium HK.1671041702600001.

- Para penghadap telah saya, Notaris sendiri,

- Para penghadap dengan ini mengetahui bahwa para

penghadap mengusulkan yang berjumlah Rp.100.000.000,-

(seratus juta rupiah), yang merupakan dari kekayaan

perbadinya (sendiri) untuk dipergunakan sebagai kekayaan

dan sekitar sebagian yang dimiliki oleh dirinya.

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan

perundang-perundangan yang berlaku serta dengan sifat dari

pihak yang bersangkutan, para penghadap sepakat dan setuju

untuk membuat surat yayasan dengan Anggaran Dasar

sebagai berikut:

----- SURAT HAMAR TERHATU YAYASAN -----

----- Pasal 1 -----

1. -Yayasan ini bernama "YAYASAN HUTAN SUMUR

PALEMBANG,

Untuk dituliskan dalam anggaran dasar ini cukup dituliskan

Ormas Yayanah), berkedudukan dan berkedudukan di —
di Kota Palembang, Propinsi Sumatra Selatan
2.-Yayanah dapat membuka kantor cabang atau perwakilan
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pimpinan
dengan pertimbangan Pimpinan.

PASAL 19 DAN TUNJUK

Pasal 19

Yayanah mempunyai makam dan bazar di Medan, S.

1.-Sosial,

2.-Kesadaran,

MAKSUD

Pasal 20

Ormas yang dapat makam dan bazar Yayanah berwacana

ditutup. Yayanah akan dilakukan kegiatan sebagai

berikut :

1.-pendirikan dan menyelenggarakan Leimbaga-Yaynaha

pendidikan baik formal maupun non formal mulai dari
Taman Kanak-Kanak/TP Al-Qur'an hingga Perguruan

Tinggi ; pendirikan dan menyelenggarakan lembaga
pendidikan dan latihan keterampilan, berupa kursus
bahasa asing dan kursus keterampilan lainnya

2.-Menyelenggarakan lembaga pendidikan yang dikenal

sebagai Sekolah/Pondok Islam Terpadu, Pesantren,
yang terdiri dari Play Group-Taman Kanak-Kanak

Islam Terpadu, SDIT, SMPIT dan SMUIT serta Sekolah/
Pondok Sekolah/Pondok Tinggi Diniyah dan lainnya.

Pendirikan Pesantren Putra/Putri Tahfidzul Kitab

Aulad, Majlis Taklim, Kelompok Belajar Bahasa

Arab dan Kedai Buku dan usaha, lainnya.

1. -Perbaikan bantuan bimbingan ilmuiah bagi , Uroh dan _____
Riyanti, Ibu , seorang ibu pemilik perusahaan rumah _____
Abdullah (Alqadid dan Rumbeloy, As'rah Tolan, sajisa _____
ta'lim dan Islamic Centre maupun Islam pengabdianan _____
untuk pengembangan, pengetahuan dan pelatihan _____
separa Tolan.

2. -pendidikan dan menyelenggarakan kegiatan _____
baik berupa pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan _____
Sedekah (BASIS) -

JAHIKA MAKMU

Pasal 4

-Yayasan ini didirikan untuk jangka yang tidak _____
ditentukan sepanjang -

R E S A Y A H

Pasal 5

1.-Harta milik yayasan ini terdiri dari kekayaan _____
yang tidak diperoleh dari kekayaan pribadi _____
Pendiri yang disebutkan, sebagaimana yang dinyatakan _____
dalam bagian ini atas ini .

2.-Selain kekayaan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1)-
keharian Yayasan dapat juga diperoleh dari :
a.-sumbangan atau bantuan yang bersifat tidak _____
beringkat, termasuk sumbangan dari badan atau _____

perorangan di Indonesia dari luar negeri yang _____
bermaksud mendukung maksud dan tujuan Yayasan ;

b.-hakim ;

c.-hibah warisat ;

d.-perolehan lain yang tidak bertentangan dengan _____

e.-anggaran dasar Yayasan dan atau peraturan _____

perintah-indangan yang berlaku.

- 3.-Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk
maksud maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 1

- Yayasan ini mempunyai organ yang terdiri dari :
- Pembina ;
 - Pengurus ;
 - Pemimpin ;

P E N I D I R I A

Pasal 2

- Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai
keberkuasaan yang tidak diwakilkan Pengurus atau
Yayasan.
- Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota
Pembina.
- Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota
Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai
Ketua Pembina.
- Untuk pertama kali yang dapat diangkat menjadi
Pembina adalah orang perorangan sebagai pendiri
Yayasan atau yang ditunjuk oleh pendiri atau berdasarkan
yang berdasarkan imputusan rapat anggota Pembina
dimiliki mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai
maksud dan tujuan Yayasan.
- Anggota Pembina tidak diberi gaji dan tunjangan oleh
Yayasan.
- Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak terjadinya hal tersebut tersebut

sehingga diangkat anggota Pembinga berdasarkan keputusan ini untuk menggantikan anggota Pemimpin dan anggota Pengawas. 2. Anggota anggota Pembinga terpilih mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberi taliyah secara tertulis mengenai motif kerjanya kepada Yezzenah peling sebesar 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8

1. -Pada jatahnya Pembinga tidak ditentukan Taliyah.
2. -Jabatan anggota Pembinga akan berakhir dengan mundurnya apabila anggota Pembinga tersebut:
 - a. -jatuh suria;
 - b. -mengundurkan diri dengan peroritahmen secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);
 - c. -diketahui lagi sifat penceraian peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. -ditunjuk oleh berdasarkan keputusan Rapat Pembinga;
 - e. -dinyatakan palsu atau diambil dibawah pengampuan berdasarkan Keputusan Pengadilan;
 - f. -ditutup untuk menjadi anggota Pembinga karena peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. -Anggota Pembinga tidak boleh mengikap sebagai anggota Pengawas dan atau anggota Pengawas.

THAG DAN MEMERANG PERDIDIK

Pasal 9

1. -Pembinga berwajib bertindak untuk dan atas nama Pembinga, apabila Pembinga lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwajib bertindak untuk dan atas nama Pembinga ditentukan oleh para Pembinga.
2. -Kewajiban Pembinga seiputi :

- a.-Ringkasan mengenai pertemuan Pengajar dan Dikir.
 - b.-Penyeimbangan dan Penberhentian anggota Pengurus dan anggota Dewan.
 - c.-Penetapan kebijakan dalam Tasyakun berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan.
 - d.-Perbaikan program kerja dan pencapaian anggaran tahunan Yayasan.
 - e.-Penetapan kegagalan memenuhi pengembang atau penutupan Yayasan.
 - f.-Penyeimbangan laporan tahunan.
 - g.-Penyeimbangan Likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.
- 3.-Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segera tujuh dan seorang diberikan kepada ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pada teginya.

RAPAT POMONA

pasal 10

- 1.-Rapat Pomona adalah rapat paling sedikit dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana diamanati dalam pasal 12. Pomona dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota pengurus, atau anggota Pengawas.
- 2.-Panggilan Rapat Pembina dilakukan Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- 3.-Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal

- sehingga, tempat dan acara rapat.
- b.-Rapat Pemilu diadakan di tempat kedudukan Tasyanah, atau di tempat kegiatan Tasyanah, atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia.
- d.-Dalam hal semua anggota Pemilu hadir, atau dimaklumi pengalih tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pemilu akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pemilu yang hadir.
- e.-Rapat Pemilu dipimpin oleh Ketua Pemilu, dan jika Ketua Pemilu tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pemilu akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pemilu yang hadir.
- f.-Seorang anggota Pemilu hanya dapat dimaklumi dalam Rapat Pemilu berdasarkan Surat Kuasa.

Paragraf 11

- 1.-Rapat Pemilu adalah sebuah perkumpulan yang singkat, apabila :
- dimulai pada waktu paling 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pemilu,
 - Dalam hal Forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) turut ada tidak terwakil, maka dapat diadakan persenjataan Rapat Pemilu hadir,
 - Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal penerbitan dan tanggal rapat,
 - Rapat Pemilu tidak diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 23 (duapuluh) hari terhitung sejak Rapat Pemilu pertama.

- 1.-Rapat Pembina kedua adalah salah satu dari tertiuk mengambil keputusan yang menakutkan, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina.
- 2.-Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan menyuarah untuk suifikat.
- 3.-Dalam Keputusan berdasarkan menyuarah untuk suifikat maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju Terdiri 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- 4.-Dalam hal suara setuju tidak setuju atau banyaknya, maka suarilah ditolak.
- 5.-Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:
 - a.-Setiap anggota Pembina yang hadir berhak menyuarakan 1 (satu) suara dan kesahan 1 (satu) suara untuk setiap Anggota Pembina lain yang dimakillinya.
 - b.-Pemungutan suara menggunakan diri orang dilakukan dengan cara suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara menggunakan hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, sebaiknya ketika Rapat menentukan lain dan tidak ada keterbatasan dari yang hadir.
 - c.-Suara yang dihitung dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ditunjukkan.
 - d.-Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretariat rapat.
- 6.-Penandatanganan sebagaimana disebutkan dalam ayat (d) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.

- 11.-Pembina dapat mengambil keputusan yang salah tanpa —
meminta izin kepada Pemimpin dengan ketentuan bahwa —
anggota Pembina tidak diberi tahu sebab ia tulis dan —
berikan anggota Pembina sebelumnya perintahannya mengenai —
ambil yang diajukan secara tertulis serta —
memandatangani perintahannya tersebut.
- 12.-Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam —
ayat (3) merupakan keputusan yang sama dengan —
keputusan yang diambil dengan niat dalam Rapat —
Pembina.
- 13.-Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia —
dapat memodifikasi keputusan yang dia buat dengan mengikat.
- RPT TAHUN
- Pktl. 12
- 1.-Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan paling —
lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan —
ditutup.
- 2.-Dalam rapat tahunan, Pembina melaksanakan —
a.-Evaluasi tentang harta kekayaan, hasil dan kewajiban —
Yayasan tahun yang lalu sebagai dasar —
pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan —
Yayasan untuk tahun yang akan datang.
- b.-Penyampaian Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus.
- c.-Pemilihan ketua dan wakil Yayasan.
- d.-Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran —
tahunan Yayasan.
- 3.-Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat —
tahunan, berarti memberi petunjuk dan perbaikan —
langgung jawab sepihaktinya kepada para anggota —
Pengurus dan Pengawas atas pengurus dan pengawas —

yang tidak dijalankan selama tahan belum yang satu,
sehingga tindakan tersebut tercantum dalam Laporan
Tahaman.

— P R E G U M U S —

— Pasal 13 —

1. - Pengurus adalah organ yayasan yang dilaksanakan
kepengurusan yang seluruh anggotanya terdiri dari:
a. - seorang Ketua;
b. - seorang Sekretaris;
c. - seorang Bendahara.
2. - Dalam hal dianugrah takih dari 1 (satu) orang
diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
3. - Dalam hal dianugrah takih dari 1 (satu) orang
diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
4. - Dalam hal dianugrah takih dari 1 (satu) orang
Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat
sebagai Bendahara Umum.

— Pasal 14 —

1. - Yang dapat dianugrah takih sebagai anggota Pengurus adalah
orang perorangan atau kalau dilakukan perbuatan
hukum dari tidak punya diisyaratkan berdasarkan dalam
peraturan perundang-Undangan yang membebaskan
kronik bagi Yayasan, Bantuan, atau negara
berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5
(lima) tahun berhitung sejak tanggal putusan tersebut
berkuatkuasa bahan tetap.
2. - Pengurus dianugrah oleh Pembina berdasarkan
keputusan Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun dan dapat dianugrah kembali.
3. - Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium

- a. - Apabila Pengurus Yayasan
b. - dilain halnya Yayan dan Ustaz berattività bersama dengan
Cendekiawan, Penulis dan Pengasuh dan
d. - dilakukannya kepergianan Yayasan secara langsung
dan sebaliknya.
- e. - Dalam hal jabatan Pengurus Bapang, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Penulis harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
- f. - Dalam hal posisi jabatan Pengurus Bapong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Penulis harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi Pengurus baru, dan untuk membentuk Yayasan diperlukan oleh Pengasuh.
- g. - Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis kepada sang penulisnya terhadap Penulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum lajut pengunduran dirinya.
- h. - Dalam hal teritipati penistaan Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukannya penistaan Pengurus Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan penistaan tersebut secara terpisah kepada Komptekian Hukum dan Hukum Anak Manusia Republik Indonesia dan Tidak terkait.
- i. - Pengurus tidak dapat memanggil sebagai Penulis, pengasuh atau Pelaksana Kegiatan.

1. mendengar durasi 1

2. menyampaikan diri

3. Berdasarkan sebabnya, tidak pidana berdasarkan perbuatan
peringkat dan yang diancam dengan hukuman penjara 5

(lima) tahun

a. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pemimpin

b. Penyelepasan berakhir

TUGAS DAN WENANG PENGURUS

Pasal 16

1. -Pengurus bertanggung jawab pembiayaan kepengurusan
Yayasan untuk kepentingan Yayasan

2. -Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan
anggaran dana dan Yayasan untuk dilaksanakan

3. -Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala
hal yang ditanyakan oleh Pengurus

4. -Setiap anggota Pengurus wajib dengan sikap baik dan
penuh tanggung jawab melaksanakan tugasnya dengan
mematuhi peraturan perundang undangan yang
berlaku

5. -Pengurus berhak membuat tayangan dalam dan diluar
peringkat tentang segala hal dan dalam negara
kecuali, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai
berikut

a. -Menyalah atau meminjam uang atas nama Yayasan
(tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank)

b. -Mendirikan suatu usaha baru atau melakukannya
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam
maupun diluar negeri

c. -Memberi atau memberi penyalihan atas harta tetap

d. -Memberi atau dengan cara lain mendapatkannya

- a. Mengambil harta benda tanpa izin dari Yayasan.
- b. Melakukan tindak dengan cara tidak memperbaiki keadaan Yayasan atau mengambil/menyahkati kekayaan Yayasan.
- c. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pemimpin dan atau Pengurus Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya makna dan tujuan Yayasan.
- d. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (3) huruf a,b,c,d,e dan f harus mendapat penolongan dari Pemimpin.

..... Panel 17

- 1.-Pengurus tidak berwenang memiliki Yayasan dalam hal-
- 2.-Menyalahgunakan penghasilan Yayasan
- 3.-Membatasi kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak-
- lain
- 4.-Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pemimpin, Pengurus dan Pengurus Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya makna dan tujuan Yayasan.

..... Panel 18

- 1.-Bebas Untuk berbuat-buat dengan datih seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atau nama pengurus serta memiliki Yayasan.
- 2.-Balas hati Ketika seseorang tidak hadir atau berhalangan kerana sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dituntut kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua

Tahapnya berlaku sama dengan ketentuan dalam arti
spahit ke Sekretaris. Dalam hal tidak berdiri atau berhalang-halang
ketika sebuah wajah singgah, hal tersebut tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, sebaliknya ketika Tahapnya
berlaku sama dengan sekretaris tahapnya berlaku
berlindung untuk dan atau nama Pengurus serta anggota
Yayasan.

3.-Jika hal hanya ada seorang Ketua, maka segera tugas
dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Untuk berlaku
juga baginya.

4.-Sekretaris Untuk bertugas mengelola administrasi
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka
segera tugas dan wewenang yang diberikan kepada
Sekretaris dalam berlaku juga baginya.

5.-Bendahara Untuk bertugas mengelola keuangan Yayasan,
dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segera
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara
dalam berlaku juga baginya.

6.-Penugasan tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus
ditetapkan oleh Panitia melalui Rapat Panitia.

7.-Pengurus untuk pertama kali tertentu berhak mengangkat
seorang atau lebih masing atau bukannya berdasarkan
Surat Niaga.

— PELAKUAN KEGIATAN —

Panel 19

1.-Pengurus berlaku mengangkat dan memberhentikan
Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan
Rapat Pengurus.

2.-Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan
Yayasan adalah orang-persorangan yang mau

- 1.-Pihak-pihak yang berlakukannya tindakan atau tatal peraturan disebut sebagai pihak-pihak yang bertindak dan tatal peraturan. Tindakan yang berlakukannya berdasarkan perintah dari dalam Yayasan dilakukan oleh anggota Pengurus. Tindakan yang berlakukannya berdasarkan perintah dari dalam Yayasan dilakukan oleh anggota Pengurus dengan tujuan untuk mengurangi resiko dan membantu berlakukannya tindakan tetapi ——————
2.-Pihak-pihak Keputusan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jaminan maklumat yang ditentukan oleh rapat pengurus dan dapat diangkat berbantuan dengan tidak mengurangi kepentingan Rapat Pengurus untuk memberikan tuntutan sesuai-maklumat.
3.-Pihak-pihak Keputusan Yayasan berlanggeng Jawab kepada Pengurus.

——— Pasal 20 ———

- 1.-Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus ber衝tingan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta memiliki Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta memiliki Yayasan.
- 2.-Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang ber衝tingan dengan kepentingan seorang Pengurus, maka Yayasan diangkat oleh Pengurus.

——— RAPAT PIMPINAN ———

——— Pasal 21 ———



- 1.- Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipersamaan perihal atau pertemuan tertentu yang tidak mendapat waktu dalam Peraturan. Pengurus atau Pendiri.
- 2.- Rapat Lain Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus walaupun bukan jumlah 1/3 Pengurus.
- 3.- Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pemimpin secara langsung, atau surat-surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengajuan dan tanggal rapat.
- 4.- Panggilan Rapat Pengurus ini hanya mencantumkan tempat, waktu, tempat dan secara resmi.
- 5.- Rapat Pengurus dilakukan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
- 6.- Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam Wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pendiri.

Paral 22

- 1.- Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
- 2.- Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh ilm dari pengurus yang hadir.
- 3.- Satu orang Pengurus dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
- 4.- Rapat Pengurus walaupun berhalangan mengambil keputusan yang mengikat, apabila:
 - a.- dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus.
 - b.- dalam hal korup sebagaimana disebut dalam ayat d.

- terbit di titik tertentu, maka dapat disebut sebagai Rapat Pengurus Perioritas Kedua.
- a. Pemungutan suara dalam rapat dilakukan secara surat suara, surat dilaksanakan pada hari Kamis 7 (tujuh) Februari 2014 seputar pemilihan ketua pengurus dengan tidak memperbaikkan temuan pengawas dan temuan rapat.
 - b. Rapat Pengurus kedua dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Februari puluh satu hari, termasuk surak; Rapat Pengurus pertama, rapat Pengurus kedua dan berhal yang masih berputus-pisau sejaknya, apabila dibandingkan lebih dari 1/2 (sepertiga) per dua jumlah Pengurus.

— Page 23 —

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan menyuarah untuk sejelas-jelas.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan menyuarah untuk sejelas-jelas tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (sepertiga) jumlah suara yang ada.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka ini diambil.
4. Pemungutan suara segerai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenal hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat memerlukan hal-hal dan tidak ada keterangan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak valid tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang

DEFINISI

Pengurus dapat diketahui dibentuk berdasarkan rapat yang diikuti anggotanya seluruhnya rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang diizinkan untuk rapat sebagian anggotanya rapat.

2. Perangkat pengurus yang diangkat tidak wajib (6) tidak diangkat apabila berdasarkan acara rapat dibentuk dengan alasan notaris.

3. Pengurus dapat juga mengambil komitmen yang bukan bersifat pengawas Rapat Pengurus, dengan ketentuan bahwa anggota Pengurus selanjutnya tidak mencapai terdiri dari tiga anggota Pengurus minimalnya perwakilan pengurus dengan jumlah yang diangkat secara tertulis serta mendapat persetujuan tersebut oleh pengurus.

Paral 29

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang bertugas melaksanakan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.

2. Pengurus terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengurus.

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengurus, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengurus.

Paral 25

E. Yang dapat diangkat sebagai Pengurus adalah orang nonperorangan yang memenuhi ketentuan peraturan bahwa dia dinyaatakan berwalaah dalam menjalankan perintahannya Yayasan yang menyebabkan berwalaah bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan peraturan

- 2.-Pemohon diwajibkan oleh Pemerintah memberikan Raport Penilaian kinerja (Lambat selama 30 (tiga puluh) hari sejak dilaksanakannya pelantikan), pada hari berikutnya pengangkatan raport, untuk mengisi buku catatan di bawah.

3.-Dalam hal buku catatan Pemerintah belum ada dalam jangka waktu pelantikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya pelantikan tersebut, pemohon harus menyampaikan raport untuk mengisi buku catatan Pengangkatan hari, dan untuk memenuhi Tuntutan diatas oleh Pemohon.

4.-Pemohon berhak menyudutkan diri dari jabatannya, dengan memberi tahu secara tertulis sengaja sekaligus berhentinya berpada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal penunduran dimulai.

5.-Dalam hal terdapat pengangkatan Pemerintah Tuanan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya suatu tangan dilakukan pengangkatan Pemerintah Tuanan, Pengangkatan wajib menyampaikan penuntutan secara tertulis kepada Bawaslu dan Hukum dan Hukum Republik Indonesia dan instansi terkait.

6.-Pemohon tidak dapat menyalahgunakan Pemohon, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

—dalam rangka Pengawas berhak untuk melaksanakan

i.,—Pemeriksaan dan ijin

ii.,—Perbaikan bukti

iii.,—beri tahu seputar isi dan isi bukti dan hasilnya

perbaikan pengetahuan yang diperlukan dengan berikan

penjelasan pada maksimal 5 (lima) telpon

d.,—memberitahui berita laporan kepada ketua Rapat Penulis,

Secara tertulis dan tertulis.

—Tujuan permenko perekonomian

—Panai 27

i.,—Penyalahgunaan ijin tidak baik dan penyalahgunaan ijin dalam bentuk bukti pengawasannya untuk kepentingan Tuan rumah.

ii.,—ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.

iii.,—Perintah bertindak

a.,—memerintahkan, halaman, atau tempat lain yang diperlukan Tuan rumah

b.,—memerintahkan dokumen

c.,—memerintahkan penilaian dan pencocokannya dengan yang Tujuh atau

d.,—memerintahkan segala benda dan yang telah diberikan oleh Pengurus.

e.,—memberi i peringatan kepada Pengurus.

ii.,—Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

iii.,—Pemberhentian sementara itu harus dihentikan

sejara terbitnya Surat dan berangkatnya diwartakan.
Akhirnya,

12.-Dalam Jangka waktu 2 (dua) hari terhitung sejak
tempat penyerahan surat ini, Pengawas
dilantik untuk menggantikan seorang terpilih kepada
Positif.

13.-Dalam Jangka waktu 2 (dua) hari terhitung sejak
tempat penyerahan surat ini, Pembina sebagaimana
dimaksud dalam ayat (6), akan Pemilih wakil anggota
anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi
kompetisi sebanyak dua (2).

14.-Dalam Jangka waktu 2 (dua) hari terhitung sejak
tempat penyerahan diri sebagaimana disebutkan dalam
ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina
sebagai berikut berperihal pengesahan surat tanda
bantahan dilantik anggota Pengurus yang bersangkutan.

15.-Dalam hal Pembina tidak sejalan dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8),
maka penyerahan surat tanda batal dan buku dan
yang bersangkutan menjahat kembali jahatannya semula.

16.-Dalam hal sejurus Pengurus dilantikkan sejurus
masuk untuk wewenang Pengawas diwajibkan mengurus
Tayakan.

RAPAT PENGARAH

Puan 20

- 1.-Rapat Pengaroh dapat diadakan setiap waktu bila
disanggap perlu atau persintaan tertulis dari seorang
atau lebih Pengawas atau Pembina.
- 2.-Panggilan Rapat Pengaroh dilakukan oleh Pengawas

- 1.-Rapat Pengawas diadakan dengan persetujuan dan pengesahan seluruh anggota Pengawas. Setiap pengesahan berisi tanda tangan, posisi jabatan & tanda mendapatkan tanda tertulis pada buku Lembah & Uluhan yang berisi surat resmi dituliskan dengan tanda tangan pengesahan dan tanda tangan rapat.
- 2.-Pengesahan rapat dilakukan dengan mencantumkan tanda tangan, waktu, tempat dan acara rapat.
- 3.-Rapat Pengawas dilakukan di tempat yang tidak ditempati sepiatan sejauh.
- 4.-Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Jalan Republik Indonesia dengan persetujuan Polda.

PASAL 29

- 1.-Rapat Pengawas di pimpri oleh Ketua Pengawas.
- 2.-Dalam hal Ketua Pengawas tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang hadir.
- 3.-Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas yang satunya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
- 4.-Rapat Pengawas setiap berhalangan membatil keputusan yang seangkat, sepihat.

 - a.-dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.
 - b.-Dalam hal kurang sebagaimana dimaksud dalam ayat 4-bisif a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemungutan Rapat Pengawas kembali.
 - c.-Penanggihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4-bisif b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari.

Bertujuan untuk mengelenggarakan dengan baik —
sempurna dan benar Lembaga pengabdian dan pengembangan
kajian.

- a. Rapat Pengabdian tidak dielenggarakan sejauh —
10 (sepuluh) hari dari jatuhnya Lembar Diklat (LDR) pada —
satu) hari berhitung sejak Rapat Pengurus pertama.
b. Rapat Pengabdian kali ini bertujuan menyediakan kepuasan —
yang anggotanya apabila dibandingi lebih dari 1/2 —
caatu per dua) jumlah Pengabdian.

Pasal 20

1. Keputusan Rapat Pengabdian harus diambil berdasarkan —
masyarakat untuk sebaik.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan masyarakat untuk —
pertama tidak tercapai, maka keputusan diambil —
berdasarkan hasil tertinggi lebih dari 1/2 (caatu perdua)
jumlah suara yang ada.
3. Jika hal suara setuju dan tidak setuju sama —
banyaknya, maka hasil ditolak.
4. Pemutusan suara mengenai diri orang dilakukan —
dengan suara suara tertutup tanpa tanda tangani, —
sedangkan pemutusan suara mengenai hal-hal lain —
dilakukan secara terbuka, secara 2 setua. Rapat —
menentukan batas dari titik ada tanda tangan dari yang —
hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak mah tidak —
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang —
dilakukan.
6. Setiap Rapat Pengabdian dibuat berita acara rapat —
yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) —
orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh —

- rapat dilakukan setiap hari Rabu,
7. -Pembentukan yang dilakukan dalam ayat (6) tidak
dimaksudkan apakah berita acara Rapat dibuat dengan
atau tidak.
8. -Penyekutuan dapat bisa membentuk Koperasi yang salah
tanpa mendapatkan Rapat Pengawas, dengan ketentuan
seusai anggota Pengawas tidak diberitahu secara
tertulis dan seusai anggota Pengawas memberikan
perintahannya segera dan yang dilakukan secara
tertulis serta memandatannya untuk tersebut.
9. -Koperasi yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam
ayat (8), segera menyampaikan keputusan yang telah dibuat
kepada yang dimiliki dengan rapi dalam Rapat
Pengawas.

RAPAT DILAKUKAN

Pasal 31

1. -Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh
Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pemimpin,
apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pemimpin;
2. -Rapat Gabungan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai
Pemimpin;
3. -Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus;
4. -Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap
Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui
surat dengan sendapat tanda terima, paling lambat 7 -
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
5. -Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal,
tempat, tempat dan kesiapan Yayasan.

1. - Rapat dilaksanakan dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan seluruh anggota Rapat Dewan Perwakilan Daerah.
2. - Rapat dilaksanakan dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan seluruh anggota Rapat Dewan Perwakilan Daerah yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan seluruh anggota Pengadilan Tinggi yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengasas yang hadir.
- Pasal 32
1. - Satu orang Pengurus dapat dimantik oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat suara.
2. - Satu orang Pengasas hanya dapat dimantik oleh Pengasas lainnya dalam Rapat Dewan Perwakilan berdasarkan surat suara.
3. - Setiap Pengurus atau Pengasas yang turut berhadir menggalakkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengasas lain yang dimantiknya.
4. - Penanggutan suara seseorang diri orang dilaksanakan dengan surat suara tertulis tanpa tanda tangani, sepanjang penanggutan suara seseorang hal-hal lain dilakukan sedara turut, kecuali ketua Rapat memerintahkan hal-hal itu tidak ada hubungan dari yang hadir.
5. - Suara abstain dan suara yang tidak suah dianggap tidak diberikan akan dianggap tidak ada.
- KETUA DEWAN PERWAKILAN RAPAT DILAKUKAN

Pasal 33

- a. Rapat Delegasi adalah salah satu bentuk merupakan 1 raport yang dimiliki apabila di dalam pertemuan dilakukan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pimpinan.
 - b. Dalam hal Forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) turut diwakili bersepuluh, maka dapat dijadikan penanggung jawab Rapat Gabungan Indra.
 - c. Penanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan.
 - d. Rapat Gabungan Indra dilaksanakan pada paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (empat puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.
 - e. Rapat Gabungan Indra adalah salah satu bentuk keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus.
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 1/2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang diberlakukan dalam rapat.
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengetahuanya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.

5.-Berdasarkan Surat Pengantar kelembagaan yang dimuat dalam ayat (6) menulis bukti yang valid terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan usaha sejauh yang terjadi dalam rapat.

A.-Penandatanganan sebagai mana dimuat dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila berita Acara Rapat dituliskan dengan alia notaris.

7.-Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang valid tanpa menggunakan Raport. Dalam hal ini, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan bersama-sama yang dibacakan secara tertulis, dengan menandatangani surat tersebut.

B.-Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimuat dalam ayat (7) merupakan keputusan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan cara dalam Raport. Namun demikian,

TAHUN 2011

Panal 34

1.-Tahun bukti Yayasan dimulai tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tigapuluh satu) Desember.

2.-Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.

3.-Untuk pertama kali tiap tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.

LAPORAN TAHUNI

Panal 35

1.-Pengurus wajib menyusun secara tertulis Laporan

- lahanan paling tinggi di bawah tatakan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
- 2.-Laporan tahunan sesuai ketentuan beranggka:
- Laporan keuangan dan bukti-bukti Yayasan selama tahun buku yang lalu serta bukti-bukti yang telah dilaporkan.
 - Laporan keterangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
 - Laporan tahunan untuk ditandatangani oleh Pengurus dan Pendiri.
 - Salah satu terdapat anggota Pengurus dan Pendiri yang tidak merawat tanggung jawabnya berikutnya, maka yang berwajibkan harus menyertakan alasan tertulis.
 - Laporan tahunan disampaikan oleh Pembina dalam rapat tahunan.
 - Dituliskan laporan tahunan Yayasan ditulis sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan dimuatkan pada bagian pengumuman di kantor Yayasan.

PRINCIPIAL KEGIATAN PADA RAPAT

Rapat 36

- Perubahan anggaran biaya hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dibuat pada paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
- Keputusan diambil berdasarkan menyatakan untuk suatu.
- Dalam hal keputusan berdasarkan menyatakan untuk suatu tidak tercapai, maka keputusan ditentukan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau

- yang dimaksud,
- 1. bahwa seluruh anggota dewan ayat (1) tidak terdiri atas orang-orang pemahaman agama, filsafat, filsafat yang tidak patut cepat 3 (tiga) kali tertunda sedangkan Rapat Pembinaan kedua tersebut setelah selesai Rapat Pembinaan yang pertama.
 - 2. Rapat Pembinaan kedua tersebut setelah selesai Rapat Pembinaan yang pertama dari selesai Rapat Pembinaan kedua setelah selesai Rapat Pembinaan yang kedua yang dimaksud.
 - 3. Kewajiban Rapat Pembinaan kedua setelah selesai dimaksud berdasarkan persetujuan suara yang tertunda dari Rapat Pembinaan yang kedua yang dimaksud.

Paral 27

- 1. Perubahan anggaran bantuan diberikan dengan akta notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia.
- 2. Perubahan anggaran bantuan tidak dapat dilakukan sebelum melengkapi dan tujuan Yayasan.
- 3. Perubahan anggaran bantuan yang menyimpulkan perubahan ini adalah Regulasi Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Komisioner Bantuan dan Pak. Asisten Pemerintah Republik Indonesia.
- 4. Perubahan anggaran bantuan selain menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatas diberikan oleh Raport Keuangan Bantuan dan Pak. Asisten Pemerintah Republik Indonesia.
- 5. Perubahan anggaran bantuan tidak dapat dilakukan sebelum Yayasan dinyatakan puitik, kecuali dengan persetujuan bantuan.

PENGABDIAN

Paral 28

- 1. Pengabdianan Yayasan dapat dilakukan dengan

menentukan bahwa akta TBTB Tasyah dan yang
diketahui Taib, dan anggota lainnya Tasyah yang
memerlukan diri sendiri bukti.

2. Pengabungan yayasan sebagaimana disebut dalam
ayat (1) dapat dilakukan dengan memperbaiki ayat (1)
sehingga amanah yayasan melaksanakan fungsi dan
tugas dibingungkan yayasan lain.

3. amanah yang memberikan pengabungan dan yang akan
mengabungkan diri mengakui kegiatan yang sejenis.
4. yayasan yang mengabungkan diri tidak pernah
melakukan pertemuan yang berjalan tanpa dengan
anggaran disertai, ketertiban lahir dari kesadaran.

5. Untuk pengabungan Yayasan dapat disampaikan oleh
pengurus kepada Pemkota.

Paral 39

1. Pengabungan Yayasan hanya dapat dilakukan
berdasarkan keputusan Rapat Pemkota yang dihadiri
patting sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah
anggota Pemkota dan disertai patting sedikit 3/4
(tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pemkota
yang berdiri.
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan
mengabungkan diri dan yang akan menerima
pengabungan menyusun usul rencana pengabungan.
3. Usul rencana pengabungan sebagaimana disebut dalam
ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta pengabungan
oleh Pengurus dari Yayasan yang akan mengabungkan
diri dan yang akan memberikan pengabungan.
4. Rancangan akta pengabungan harus mendapat
persetujuan dari Pemkota masing-masing Yayasan.

- 5.- Berdasarkan sebagaimana diuraikan dalam ayat (4) —
diatas, maka akta penggalungan yang dibuat —
berikutnya berlaku dalam batas Indonesia. —
6.-Penyelesaian Yayasan harus dilakukan wajib —
menyampaikan hasil penggalungan dalam surat keber- —
harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga —
puluh) hari terhitung sejak penggalungan selesai —
dilaksanakan. —
7.-Dalam hal penggalungan Yayasan dituntut dengan —
perubahan Anggaran Dasar yang memperbaiki perputusan —
Komisaris dan Wakil dan Hal-hal lainnya, maka akta —
perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib dimampulkan —
seperti komisaris dan Wakil dan Hal-hal lainnya untuk —
mengalih posisi mereka dengan dilanjutkan —
penggalungan. —

PENGALIH POSISI

pasal 40

- 1.-Yayasan tidak berfungsi ; —
a.-Jika sebagaimana disebutkan dalam pasal ini akta —
yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir ; —
b.-Hukum Yurisdiksi yang ditetapkan dalam Anggaran —
Dasar telah tercapai atau tidak tercapai ; —
c.-Putusan pengadilan yang telah berhukutan hukum —
tetap berdasarkan alasan ; —
1.-Yayasan melanggar ketertiban umum dan keselamatan —
2-tidak sampai membayar utangnya setelah ditanya tak —
pilih ; atau ; —
2.-Harta bahanayaa Yayasan tidak cukup untuk —
melunasi utangnya setelah ditunjukkan pilih —
dicabut. —

2.-Dalam hal Yayasan belum membentuk surat dalam bentuk surat a dan b, Pemohon segera ajukan Litigator untuk membenarkan kekayaan Yayasan.

3.-Dalam hal tidak di temui Litigator, maka Pengurus ber tindak sebagai Litigator.

— Panel 4 —

1.-Dalam hal Yayasan belum, Yayasan tidak dapat melaksanakan perbaikan hukum, kecuali untuk membenarkan kekayaannya dalam proses Litigasi.

2.-Dalam hal Yayasan sedang dalam proses Litigasi, untuk semua tuntutan dilantikkan frase "dalam litigasi" di depannya namanya Yayasan.

3.-Dalam hal Terusak berbar karena pertama pengadilan, maka penugasan juga menunjuk Litigator.

4.-Dalam hal Penubuhan Yayasan karena pailit, berlaku persetujuan perundang undangan di bidang kewajibahan.

5.-Kewajiban mengenai pemotongan, pengangkutan, pembaharuan sementara, pembaharuan, sebenarnya, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta penggunaan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi Litigator.

6.-Litigator atau karakter yang ditunjuk untuk melaksanakan perbaikan kekayaan Yayasan yang berbar atau dibuktikan, patting lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penugasan pemotongan wajib menggunakan pembubaran Yayasan dan proses Litigasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

7.-Litigator dan kurator dalam jangka waktu patting lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses Litigasi berakhir, wajib mengumumkan hasil Litigasi dalam surat kabar harian berbahasa

3. Penyebarluasan hak kewarisan dalam undang-undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 diakui sebagai hak kewarisan yang berlaku sejak menerapkan peraturan perundang-undangan tentang hak kewarisan bagi tahanan dan penjara.
4. Dalam hal laporan sengketa pembahagian warisan berdasarkan ayat (1) dan perpanjangan hasil pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dilakukan, maka bahayanya warisan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENERAPAN HAK KAYAAN SAMA LILIKIDASI

1. Keberadaan nilai hasil likuidasi diberikan kepada warisan lahir yang mempunyai maksaat dan tujuan yang sama dengan warisan yang berlaku.
2. Keberadaan nilai hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diterapkan kepada bahan bukti lain yang melukiskan kepiatan yang sama dengan warisan yang berlaku, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi bahan bukti tersebut.
3. Dalam hal keberadaan nilai hasil likuidasi tidak diterapkan kepada warisan lahir atau kepada bahan bukti lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), keberadaan tersebut diterapkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksaat dan tujuan kejadian yang berlaku.

PERATURAN PEMERINTAH

Pemerintah

4. Hal-hal yang tidak diatur atau belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diaturkan oleh Raperda Provinsi.

Pengurus dari ketimbang di Tuan Herry Prayitno (6),
Puan Siti ayah (1) dan Puan Syaiful Anugrahan
Dewi (6) anggota ketua kara pinggiran Desa Dukuh
Penambang, dan Pengurus untuk pertama kali yang diangkat
seusai Pengurus dengan suara sejalan berikut ini:

- PEMERINTAH :

Tuan SISMARDI, lahir di Medan, pada tanggal lima
belas Mei seribustri sembilan puluh empat puluh tiga
(17-05-1963), Marga Negara Indonesia, Karyawan
swasta, bertempat tinggal di Palembang, Purwa Indah
Desa Dukuh Penambang, Kecamatan Tetapura 000, Rukun
Warga 023, Kelurahan Dukuh Lemo, Kecamatan Ilir
Barat I, Pemogong Kartu Tanda Penduduk
NIP. 1671041703470004;

- PENGAWAS :

Tuan HASTA SUMARDI, lahir di Palembang, pada
tanggal sepuluh dua seribu sembilan puluh empat puluh
tiga (10-07-1963), Marga Negara Indonesia, Swasta,
bertempat tinggal di Palembang, Taman Petelor Indah
Nomor 4-A, Rukun Tetapura 037, Rukun Warga 005,
Kelurahan Pura Nusa, Kecamatan Kemuning, Pempong
Kartu Tanda Penduduk NIK. 1671091607630003.

- PENGURUS :

1. - KETUA :

Tuan MUJIBUR RAHMAT, lahir di Palembang, pada
tanggal limabelas November seribu sembilan puluh
tujuhpuluhan enam (13-11-1976), Marga Negara
Indonesia, Karyawan swasta, bertempat tinggal di
Palembang, Jalan Ray Zen Lr. Cendana Nomor 10, Rukun
Tetapura 016, Rukun Warga 004, Kelurahan Deli

Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 101 Tahun
2018, Nomor 1671007700003.

2. -SENDE TWINTU :

Tuan MAMPU HUMIIP, bintang di Palombang, pada
tempat dan tanggal diajukan surat ini adalah sebagai
berikut ini, dia, (17-03-1977), Warga Negara
Indonesia, dia, bertempat tinggal di Palombang,
Kabupaten Pemalang, Jl. Pr. Siliwangi Dus. 1, RT. 01
RW. 041, Desa Marpa OII, Kecamatan SA Mts, Kabupaten
Pemalang 51111, Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi
KAL, 1671007700003.

3. -PENDAHARA :

Tuan MUHAMMAD IQBAL, bintang di Kayu Agung-OII, pada
tempat dan tanggal diajukan surat ini adalah sebagai
berikut ini, dia, (30-03-1978), Warga Negara Indonesia,
Perdamaian, bertempat tinggal di Palombang, Jalan
Batu Tua Nomor. 1091, Desa Telanqa OII, Kabupaten
Marpa OOI, Kecamatan SG LII, Kecamatan Ekor
Barat I, Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi
KAL, 1671113000750003.

-Penugasan anggota Polda Kalimantan Tengah, anggota
Pengrajan Teyanan dan anggota Pengrajan Teyanan
tersebut tidak di laksanakan dengan yang
beresponsibilitas dan harus dilakukan dalam Rapat Perabina
perlakuan hasil dilakukan, melalih Akta Polda Kalimantan
tidak mendapat penuntutan atau didatarkan pada instansi
yang berwenang.
-Pengrajan Teyanan dan

tidak berdasarkan saran dan surat ini dengan hal

terdiri atas sejumlah bahasan ini kepada orang lain —
diketahui olehnya dengan jelas dan tulus —
pada hari atau anggaran Dua puluh lima —
yang bersejalan dengan atau sebatas pengubahan dan atau
tambah dalam perihal yang bersifat sifat yang —
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan
mengajukan serta menandatangani semua perjanjian dan
dokumen lainnya, untuk memiliki tempat kedudukan dan
untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin —
diperlukan.

Acta ini dituliskan pada 19,20 VIII (empat belas)
Jumat dasapuan bulan Maret Tahun Tujuh Ratus Dua Puluhan,
Pada pukul sepuluh waktu, Notaris ikut.

— DEMIKIANLAH ACTA INI —

Diketahui bahwasan bahwa dua orang diatas di Palembang,
juga baik, tamak, beras, lahan dan tanah tersebut dalam
keadaan sama-sama dengan diketahui diatas :

- 1.—Tuan HERVIAN SIRYANTO, Sarjana Hukum, lahir di
Palembang pada tanggal sepuluh bulan September seribu
semilapan ratus tujuh puluh lima (14-11-1970), pegawai
Bantuan notaris, bertempat tinggal di Palembang, Jalan
Mayor Bellia Batubara Nomor Rumah Nomor 1234,
Kelurahan 20 Ilir B-II, Kecamatan Rumbai.
- 2.—Tuan SUMEDIN, lahir di Purworejo-Citarik sis
pada tanggal dua puluh dua September seribu sembilan
ratus tujuh puluh tujuh (22-09-1977), pegawai bantuan
notaris, bertempat tinggal di Palembang, Jalan Pantai
Selatan Kilometer 10, Rukun Tetangga 024, Rukun Marga
DPR, Kelurahan Kotabuncit, Kecamatan Sukarame
yang juga, Notaris ikut, sebagai saksi masing.

HUSNAWATY, SH
SEPTAKTI PAKAR HUKUM

Pada kesempatan kali ini, saya, Husnawaty berharap kepada para pengunjung dan mahasiswa agar selalu diingat bahwa
Pengaruh media pada persepsi dan nilai-nilai dan norma, —

Husnawaty,

(berharap bahwa karya tulisnya diterima)

Bersama-sama untuk mendekati tujuan akademik,
berjaya dalam penelitian dan menghindari kesalahan.

